

---

**PENGARUH KUALITAS PENGELOLA KEUANGAN DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA MANADO**

Sinambow Gloria Injilita Bulan<sup>1</sup>, Jantje Tinangon<sup>2</sup>, Lidia Mawikere<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Rtulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado  
95115, Indonesia

E-mail : gloriainjilita@gmail.com

**ABSTRACT**

*The government's internal control system, in achieving the effectiveness of regional financial management, is required by the government apparatus (financial manager), and should be able to provide adequate assurance. This study aims to determine the effect of the quality of financial managers on the effectiveness of local financial management and the influence of internal control systems of government on the effectiveness of local financial management. This study uses the method of Pearson Correlation. In this study did not use the sample but took the population of all auditors including also functional apparatus as many as 45 people. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS. The result of the research shows that there is a significant influence between the quality of financial manager and the government's internal control system on the effectiveness of local financial management.*

*Keywords: quality of financial manager, internal government control system, effectiveness of regional financial management*

**1. PENDAHULUAN**

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. (Agustina 2013 :2)

Aspek-aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. (Agustina 2013 :2)

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan

---

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahny. (Lamusu, 2013 :17)

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut berupa sistem pengendalian intern. Dimana sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus olem pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No.60 Tahun 2008)

Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah, dan tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkatan pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. (BPK RI, 2016)

Selain sistem pengendalian intern pemerintah, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan aparatur pemerintah/sumber daya manusia. Beberapa masalah dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten/berkualitas dibidang keuangan. (BPK RI, 2016)

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas/kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. (Ira, 2013)

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas pengelola keuangan/sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai kualitas pengelola keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen, perluasan sampel, dan teknik pengambilan sampel yang berbeda. Oleh karena itu masalah umum yang rentan terjadi dalam sistem pengendalian intern pemerintah yaitu para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab tidak/belum melakukan pencatatan yang akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur

---

yang ada, belum adanya kebijakan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian, sedangkan dalam kualitas pengelola keuangan sendiri terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadi kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan benar yang tentu saja dalam jangka panjang akan merugikan tidak hanya keuangan daerah tetapi juga masyarakat

## 1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemkot Manado
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemkot Manado
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemkot Manado

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Akuntansi

Winston Pontoh (2013 :2) Akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi

### 2.2. Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2012 :37) dalam pengertian umum yang khususnya bagi dunia akuntansi dinegara-negara maju organisasi sektor public terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Pemerintah Pusat, yang terdiri dari departemen dan badan-badan dibawah pemerintah eksekutif.
2. Industri atau perusahaan untuk kepentingan public atau masyarakat luas
3. Pemerintah Daerah, bagi tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota

### 2.3. Akuntansi Pemerintahan

(Sujarweni 2015 :18) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan.

### 2.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut *Committee of sponsoring organization (COSO) dari Treadway Commission* (komisi nasional Amerika untuk penyelewengan laporan keuangan) (Azhar Susanto, 2013 :95): “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan uang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

### 2.5. Kualitas Pengelola Keuangan

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting yang harus dilihat dalam sebuah instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, professional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan kerja yang efektif dan efisien. Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi

---

membawa karakteristiknya seperti kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk perilaku pegawai.

## **2.6. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

. Menurut Mardiasmo (2012 :134) mengemukakan definisi efektivitas sebagai berikut “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif”. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan yang terukur atau nilai yang menunjukkan prestasi (keunggulan) dari suatu manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Efektivitas lebih mengacu kepada keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai.

## **2.7 Hipotesis**

**H1=** Kualitas Pengelola Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

**H2=** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

**H3=** Kualitas Pengelola Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

1. Amaliawati & Rizka (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa SPIP, Kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Iskandar (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi SDM dan Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Paendong (2012) dalam penelitiannya Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan sumber data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016)

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Inspektorat Pemerintah Kota Manado dalam bentuk wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian adalah bulan Maret s.d Mei 2017.

### **3.3. Distribusi Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016 :119), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dalam lingkungan inspektorat pemerintah kota manado. Unit penelitian individu, sedangkan obyek penelitian atau responden yang menjadi sumber data adalah pegawai, pimpinan/pelaksana, pengawas, atau pemeriksa pada instansi tersebut. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel dan responden yang diambil adalah seluruh auditor

termasuk juga aparatur fungsional sebanyak 45 orang sudah termasuk dengan 5 orang pejabat eselon 4 dan 4 orang pejabat eselon 3.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numeric (angka) melalui kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada Aparatur Inspektorat di pemerintah kota manado. Sumber data yang digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui pihak perantara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Dalam hal ini peneliti melakukan pembagian kuesioner kepada aparatur inspektorat pemkot manado

### **3.6. Definisi Dan Pengukuran Variabel Operasional**

Y = Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, variabel ini diukur dengan skala likert.

X<sub>1</sub>= Kualitas Pengelola Keuangan, variabel ini diukur dengan skala likert.

X<sub>2</sub>= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, variabel ini diukur dengan skala likert.

### **3.7. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari responden lewat kuesioner yang dikodekan sesuai dengan skala *likert* 1-4, akan ditabulasi dengan menggunakan analisis statistik dengan program komputer SPSS. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan beberapa tahap, pertama analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan terakhir uji hipotesis.

## **4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Inspektorat Kota Manado sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, merupakan unsur pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Manado sebagai penjabaran fungsi manajemen yakni *controlling*, yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Manado dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Inspektorat Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya manusia sebanyak 45 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 9 orang, Pejabat Fungsional Tertentu terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 11 orang. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian sebanyak 2 orang.

### **4.2. Hasil Penelitian**

Responden penelitian adalah Aparatur Inspektorat pada Pemerintah Kota Manado sejumlah 45 Orang. Data diperoleh dari kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti. Kuesioner di antar dan langsung diambil pada responden dengan waktu 7 hari kerja. Peneliti melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih terkait dengan variable penelitian yang ada dan mengkonfirmasi jawaban dari para responden. Penyebaran kuesioner pada Bulan Mei 2017.

### Uji Kualitas Data

Untuk melihat apakah data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dapat dipercaya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Penelitian ini telah lulus uji validitas dan uji reliabilitas.

### Uji Asumsi Klasik

Agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan akurat maka dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini telah lulus uji normalitas, multikolinieritas serta heterokedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Uji t Test

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-50.885	25.496		-1.996	.052
	X1	4.298	.679	.663	6.333	.000
	X2	1.221	.475	.269	2.573	.014

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan (2017)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (kualitas pengelola keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan daerah).

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X1 (Kualitas Pengelola Keuangan) diperoleh  $t$  hitung = 6.333 >  $t$  tabel = 2.018 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5 %, yang berarti  $H_0$  (kualitas pengelola keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah) ditolak dan  $H_a$  (kualitas pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah) diterima. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu kualitas pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah) diterima.

#### **H1= Kualitas pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah**

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 (SPIP) diperoleh dengan  $t$  hitung = 2.573 >  $t$  tabel = 2.018 dengan tingkat signifikansi 0,014 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5 %, yang berarti  $H_0$  (sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah) ditolak dan  $H_a$  (sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah) diterima. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah diterima.

#### **H2= Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah**

Dari hasil regresi linear berganda dan uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa kedua koefisien regresi tersebut bertanda signifikan. Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Variabel kualitas pengelola keuangan (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan nilai regresi 0,663 dan nilai t hitung = 6.333 dengan tingkat signifikansi 0,000.
2. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan nilai regresi 0,269 nilai t hitung = 2.573 dengan tingkat signifikansi 0,014.

#### 4.3. Pembahasan

##### **Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis 1 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya 0,000 dan nilai t hitung = 6.333. Pengaruh antara kualitas pengelola keuangan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin berkualitas pengelola keuangan (aparatur/sdm) maka pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004), bahwa setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kualitas/kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Begitu pun bagian keuangan yang harus diisi oleh aparatur/sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Sejalan juga dengan penelitian ini bahwa sesuai dengan pernyataan aparatur inspektorat bahwa keuangan/akuntansi harus memiliki staf yang berkualitas, memiliki uraian Tupoksi serta peran dan tanggungjawab yang jelas, harus mengikuti prosedur dan proses akuntansi, serta banyak mengikuti pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dan tugas. Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang menjaga dan meningkatkan kualitas yang dimiliki melalui pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan.

##### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hipotesis 2 penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai t hitung = 2.573 dan nilai signifikansi 0,014. Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diterapkan maka semakin terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Hal ini sejalan dengan Amien (2010) menyatakan bahwa efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian intern yang memadai secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprayogi (2010) yang menemukan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dilihat dari distribusi frekuensi, sistem pengendalian intern pemerintah telah terlaksana dengan baik. Sejalan juga dengan penelitian ini bahwa sesuai dengan pernyataan aparatur inspektorat bahwa instansi harus memiliki kode etik tertulis, contoh berperilaku etis dari pimpinan, satuan pengawas intern terdiri dari staf yang berkualitas/berkompeten, adanya pemeriksaan yang independen terhadap kinerja, adanya sistem informasi yang dapat membantu meyakinkan tanggungjawab, dan adanya pengawasan untuk menilai kualitas pengendalian intern. Dalam kenyataannya sistem pengendalian intern pemerintah untuk menghasilkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah memadai.

---

## **Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hipotesis 3 sesuai dengan penjabaran diatas menunjukkan bahwa kualitas pengelola keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sejalan juga dengan penelitian ini bahwa sesuai dengan pernyataan aparatur inspektorat bahwa pemma menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD, anggaran yang disusun mudah diakses, dan keuangan daerah ditata sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan yang berada di Inspektorat Kota Manado saat ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pegawai yang menduduki posisi pengelola keuangan mengetahui bidang ilmu sesuai dengan posisinya, karena seorang pegawai akan berperan dalam menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dengan semestinya.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Kualitas pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin berkualitas/berkompeten pengelola keuangan (aparatur sdm) maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik sebaliknya kualitas pengelola keuangan yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin buruk.
3. Kualitas Pengelola Keuangan dan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin berkualitas/berkompeten pengelola keuangan dan semakin baik SPIP maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik. sebaliknya kualitas pengelola keuangan yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk dan semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin buruk.

#### **5.2. Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

Adapun saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti teknologi informasi akuntansi, pengawasan fungsional, dan lain-lain.
3. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode wawancara langsung, survei lapangan, observasi, dan lain-lain.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina 2013, kutipan Saleba 2014. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah". (Online), (<http://kim.ung.ac.id/>)
- Amaliawati, Riska (2015). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung". (Online), ([repository.widyatama.ac.id/](http://repository.widyatama.ac.id/))
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2016, (Online), (<http://www.bpk.go.id/>)
- COSO 2013, *Internal Control-Integrated Framework : Executive Summary*, Durman, North Carolina
- Ira 2013, kutipan Saleba 2014 "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Iskandar, 2015, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Kota Pekanbaru, (<http://kim.ung.ac.id/>)
- Lamusu, 2013. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD kabupaten gorontalo, (<http://kim.ung.ac.id/>)
- Mardiasmo, 2012. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Online), (<http://www.bpkp.go.id/>.)
- Paendong, 2012, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango" ,(<http://kim.ung.ac.id/>)
- Pontoh, W. 2013 "Akuntansi Konsep dan Aplikasi". Penerbit Halaman Moeka, Jakarta.
- Sujarweni. 2015. "Akuntansi Sektor Publik", Pustaka Baru Press
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Online), (<http://www.kemenag.go.id/>).